

Ringkasan

Rencana Pengelolaan Lanskap Mutis Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bentang Lahan Mutis yang Lestari dan Berkeadilan menuju Masyarakat yang Sehat, Sejahtera dan Berbudaya





Suplemen Taklimat Edisi Bentang Lahan #04

Ringkasan

Rencana Pengelolaan Lanskap Mutis Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bentang Lahan Mutis yang Lestari dan Berkeadilan menuju Masyarakat yang Sehat, Sejahtera dan Berbudaya

Tim Penulis

(Kelompok Kerja Bentang Lahan)

Regina H. Kase, ST, M.Si, Ester H. Natty, S.P., Arfaksad Aoetpah, SP, Yus Kris Hau Oni, NE, Robinson Liunokas, ST, Bapak Ir. Musa N. H. Djari, M. Si, Kornelis M. K. Timo, S.Si, Seprianus K. Tualaka, ST., M. Eng, Jitro Liunokas, S. TP

Tim Teknis

(ICRAF Indonesia)

Feri Johana, Suyanto, Andree Ekadinata, Sonya Dewi Ni'matul Khasanah, Ira Ratna Sari, Hikmah Fajar Assiddiq, Seruni Fauzia Lestari, Yeni Fredik Nomeni, Jendri Nenobais, Alfonsus Seran, Erlangga, Thifali Adzani, Cecilia Novia, M. Fikri Fadhillah, Izhar Ashofie Romadhona Hartiyadi, Neno To Tabelak Oematan Mixon Mexi Kase, Marselus Nabu, Dominggus Oematan

Tim Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Dhian Rachmawati
Riky Hilmansyah

Natty EH, Kase RH, Aoetpah A, Oni YKH, Liunokas R, Djari MNH, Timo KMK, Tualaka SK, Liunokas J, Johana F, Suyanto, Ekadinata A, Dewi S, Khasanah N, Sari IR, Assiddiq HF, Lestari SF, Nomeni Y, Nenobais J, Seran A, Erlangga, Adzani T, Novia C, Fadhillah MF, Ashofie I, Hartiyadi R, Oematan NTT, Kase MM, Nabu M, Oematan D, Rachmawati D. 2025. *Suplemen Taklimat Edisi Bentang Lahan #05 – Ringkasan Rencana Pengelolaan Lanskap Mutis, Kabupaten Timor Tengah Selatan: Bentang Lahan Mutis yang Lestari dan Berkeadilan menuju Masyarakat yang Sehat, Sejahtera dan Berbudaya*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

© 2025 World Agroforestry (ICRAF)

Publikasi ini dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial sepanjang tidak mengubah isi, dengan kewajiban mencantumkan sumber sesuai kaidah yang berlaku.

Informasi disusun seakurat mungkin berdasarkan pengetahuan saat diterbitkan; namun penerbit tidak memberikan jaminan apa pun dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaannya.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416
Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Aldi Cesar Parulian

2025

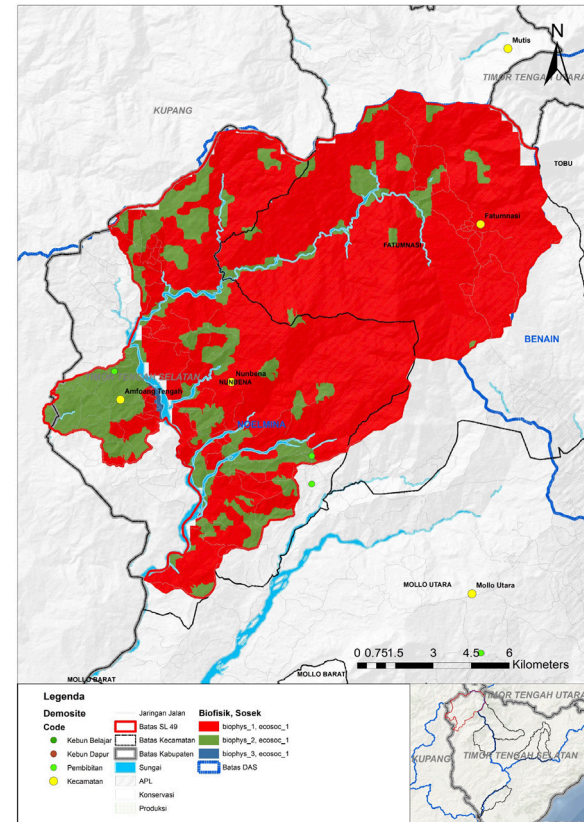
Daftar Isi

- 2 Gambaran Umum
- 3 Visi: Bentang Lahan Mutis yang Lestari dan Berkeadilan menuju Masyarakat yang Sehat, Sejahtera dan Berbudaya
- 4 Strategi dan Target
- 5 Peta Intervensi
- 6 Model Bisnis Kemitraan Konservasi: Pelestarian Lebah Madu dan Pengembangan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal
- 9 Analisa Profitabilitas
- 10 Profitabilitas Sistem Usaha Tani
- 11 Strategi 1-Penguatan Pengelolaan Kemitraan Konservasi
- 12 Strategi 2- Rehabilitasi Hutan Berbasis Agroforestri dan Kearifan Lokal Untuk Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
- 13 Strategi 3 - Pengembangan Produk Komoditas Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pertanian
- 14 Kesimpulan



Gambaran Umum

- Sub Lanskap Mutis terletak di bagian utara Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang sebagian besar wilayahnya meliputi kecamatan Nunbena dan Fatumnasi. Lanskap ini diberi nama Mutis karena sebagian besar area kawasan ini (61,5%) masuk dalam kawasan Taman Nasional Mutis Timau. Saat ini kawasan hutan ini sedang dalam proses pengajuan permohonan untuk dikelola melalui skema Perhutanan Sosial (PS).
- Sub Lanskap Mutis memiliki luas 19.927,4 Ha yang meliputi 12.254,3 Ha kawasan hutan (61,5%) dan 7.673,1 Ha Area Pengguna Lain (APL) yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian umbi-umbian dan kacang-kacangan.
- Sebagian besar tutupan lahan pada kawasan hutan ini didominasi oleh tanaman Ampupu (*Eucalyptus Urophylla*) dan Cemara (*Casuarinaceae*) yang tumbuh secara alamiah. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) utama di area ini adalah madu hutan.
- Topografi kawasan ini berbukit sampai bergunung, keadaan lereng miring sampai curam, bergelombang sampai bergunung dan sebagian besar wilayahnya mempunyai kemiringan 60% ke atas.
- Isu dan permasalahan utama yang sering terjadi di kawasan ini adalah kekeringan, longsor, tebas bakar/ ladang berpindah, ternak lepas, stunting dan kemiskinan ekstrim.



Visi: Bentang Lahan Mutis yang Lestari dan Berkeadilan menuju Masyarakat yang Sehat, Sejahtera dan Berbudaya

9 Harapan Masyarakat Mutis di Masa Mendatang



Strategi dan Target



STRATEGI-1

Penguatan pengelolaan kemitraan konservasi

Pengelolaan konservasi di Mutis merupakan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Upaya ini perlu diperkuat dengan pendampingan Masyarakat, penguatan kapasitas Lembaga adat, patrol dan penguatan regulasi.

Konservasi

Pemanfaatan berkelanjutan



STRATEGI-2

Rehabilitasi hutan berbasis agroforestri dan kearifan lokal untuk perlindungan dan pemanfaatan sumber daya air

Perlu dilakukan pemulihan pada area perladangan berpindah dan tebas bakar agar tidak semakin terdegradasi. Selain itu, perlu berbagai upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, seperti penanaman di sempadan Sungai, terasering, hingga penguatan regulasi.

Restorasi

Konservasi



STRATEGI-3

Pengembangan produk komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu dan pertanian

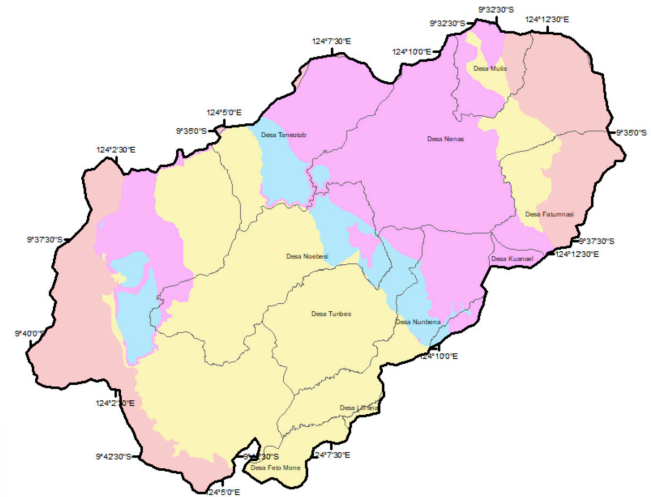
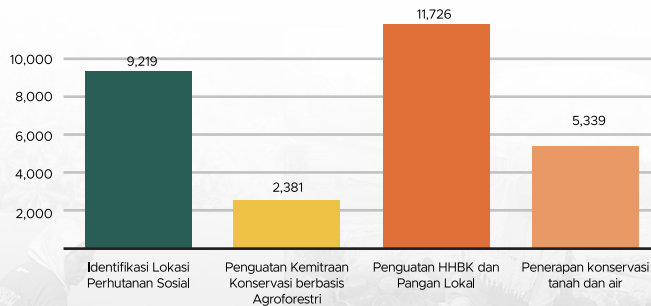
Potensi hasil hutan dan pertanian di Mutis dapat diperkuat dengan adanya peningkatan kapasitas BUMDes, pemasaran yang lebih luas, sertifikasi, pengembangan kapasitas pengolah, hingga peningkatan akses pada pendanaan inovatif.

Pemanfaatan berkelanjutan

Peta Intervensi

Peta intervensi adalah representasi spasial dari strategi pengelolaan lanskap yang menunjukkan lokasi spesifik di mana intervensi tertentu akan diterapkan. Peta ini disusun berdasarkan unit dan penentuan Lokasi kegiatan intervensi. Dengan menggunakan peta intervensi, keputusan-leputusan pengelolaan yang spesifik dapat dibuat secara lebih akurat, dengan memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan kondisi kebutuhan spesifik tiap wilayah.

Tiga strategi Lanskap Mutis telah dipetakan pada unit perencanaan yang ada. Daerah dengan luasan areal terbesar adalah untuk penguatan HHBK dan pangan lokal, karena HHBK tersebar di hampir seluruh kawasan hutan di lanskap Mutis (11.726,06 Ha). Lokasi untuk skema Perhutanan Sosial (PS) menempati luasan terbesar ke dua yaitu seluas 9,218,52 Ha, kemudian disusul dengan Lokasi untuk penerapan konservasi tanah dan air (5.339,27 Ha) serta Lokasi konservasi berbasis agroforestri (2,381,29 Ha)



Keterangan

- Identifikasi Lokasi Perhutanan Sosial
- Penguatan Kemitraan Konservasi berbasis agroforestry
- Penguatan HHBK dan Pangan Lokal
- Penerapan konservasi tanah dan air

Model Bisnis Kemitraan Konservasi: Pelestarian Lebah Madu dan Pengembangan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal

Latar belakang

- Lanskap 49 (Mutis) merupakan kawasan yang didominasi oleh hutan, dengan luas mencapai 12.254 hektar atau sekitar 61,5% dari keseluruhan wilayah lanskap. Taman Nasional Mutis Timau di Lanskap 49 memiliki keanekaragaman hayati tinggi.
- Bagi masyarakat adat Dawan (Atoni Pah Meto), Hutan Mutis adalah ruang sakral untuk berhubungan dengan leluhur, memohon perlindungan kepada Apinat-Aklahat (Tuhan), serta menjaga harmoni dengan alam. Selain fungsi ekologisnya, kawasan hutan ini juga menjadi sumber pangan, obat-obatan, pewarna tenun alami, pasokan air bersih, serta lokasi penggembalaan ternak.
- Hutan Mutis di Nusa Tenggara Timur merupakan habitat lebah hutan Apis dorsata, yang bersarang di pohon Taduk (Kapuk Hutan) dan memanfaatkan nektar Kayu Putih (Eucalyptus alba) serta Ampupu (Eucalyptus urophylla) sebagai sumber pakan.
- Pemanenan madu dilakukan secara manual, satu pohon dapat menghasilkan 300–400 liter madu, yang dulunya dipasarkan melalui Sentral Madu Mutis di bawah pengelolaan Pemerintah Desa Fatumnasi.
- Klaim kepemilikan sarang lebah diatur berdasarkan kesepakatan adat yang disetujui oleh seluruh suku. Setiap suku umumnya memiliki hak atas 5–6 pohon sebagai lokasi sarang.
- Selain madu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti tanaman obat, pewarna alami tenun, asam, pinang, getah Ampupu, bahan anyaman (bambu, daun lontar), serta pakan ternak alami untuk sapi dan kuda.

Permasalahan yang dihadapi

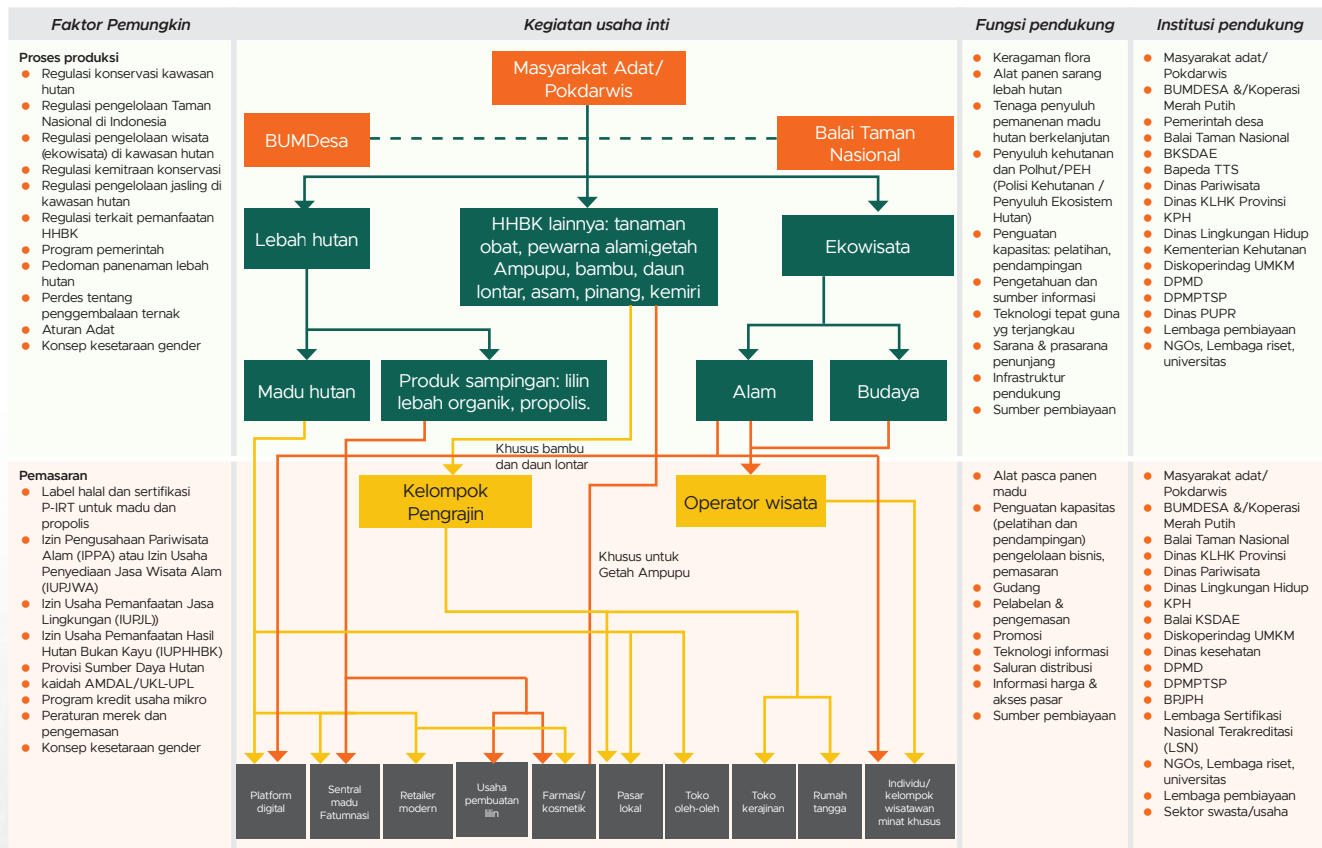
- Fragmentasi lanskap akibat ekspansi pertanian dan permukiman berpotensi memutus koridor ekologis, mengganggu pergerakan satwa, serta merusak fungsi hidrologis kawasan.
- Peristiwa kekeringan dan longsor yang berulang setiap tahun menjadi indikator tingginya degradasi lahan serta lemahnya ketahanan ekologis di kawasan tersebut.
- Kombinasi kebakaran hutan pada musim kemarau, praktik penggembalaan liar, pemanfaatan kayu sebagai bahan bangunan menjadi ancaman serius bagi ekosistem Mutis. Penggembalaan ternak di kawasan hutan secara khusus menyebabkan terhambatnya proses peremajaan vegetasi.
- Ketiadaan tata kelola bersama dalam bentuk kemitraan konservasi antara masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengelola Taman Nasional

Gunung Mutis berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya, meningkatnya potensi konflik kepentingan, serta semakin rentannya ekosistem terhadap degradasi.

- Perubahan status Gunung Mutis dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional memicu ketegangan tenurial, karena masyarakat khawatir kehilangan hak ulayat dan sumber penghidupan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan pemerintah.
- Keterbatasan partisipasi masyarakat lokal dan adat dalam proses konservasi dan penataan ruang memperkuat resistensi serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Tujuan intervensi

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan konservasi serta melestarikan ekosistem hutan Mutis melalui pengelolaan lanskap berkelanjutan, termasuk pemulihan konektivitas ekologis. Upaya ini juga bertujuan mengurangi potensi konflik dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan melalui tata kelola bersama berbasis kemitraan konservasi yang mensinergikan kekuatan dan sumber daya berbagai pihak.
- Mengembangkan ekonomi lokal berbasis hasil hutan bukan kayu, khususnya madu hutan Mutis, sebagai sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan.
- Mendorong pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal, dengan mengintegrasikan nilai budaya, spiritualitas, dan pengetahuan adat Dawan (Atoni Pah Meto) sebagai daya tarik wisata sekaligus instrumen pelestarian tradisi.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal (BUMDes, Koperasi Merah Putih, kelompok masyarakat adat/kelompok sadar wisata) dalam pengelolaan konservasi, usaha berbasis HHBK, serta pemanfaatan jasa lingkungan, agar lebih mandiri dan berkelanjutan.
- Mengurangi tekanan eksploitasi hutan melalui penyediaan manfaat ekonomi langsung dari konservasi, sehingga insentif masyarakat untuk menjaga kawasan hutan Mutis semakin kuat.



Analisa Profitabilitas

Analisis manfaat ekonomi dalam penggunaan lahan dan usaha tani menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode Land Use Profitability Assessment (LUPA) yang dikembangkan oleh ICRAF/World Agroforestry, kajian ini mengukur profitabilitas usaha tani sebagai indikator utama nilai pengembalian dari kegiatan produksi.

Profitabilitas tidak hanya mencerminkan keuntungan finansial, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan keunggulan komparatif dan kompetitif dari berbagai sistem penggunaan lahan. Simulasi dilakukan untuk memperkirakan manfaat ekonomi dari strategi pengelolaan lahan berkelanjutan dan model bisnis yang diterapkan.

Sebagai bagian dari pendekatan berkelanjutan, kajian ini memungkinkan masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa madu hutan (Apis dorsatan).



Indikator yang digunakan:

- Net Present Value: keuntungan (profit) terdiskonto selama kegiatan usaha dijalankan yang dijadikan nilai saat ini, selisih antara penerimaan terhadap biaya. Diskonto: normalisasi nilai keuntungan masa depan ke masa kini
- Equal Annual Equivalent (EAE): digunakan untuk membandingkan keuntungan SUT yang memiliki siklus hidup berbeda. EAE adalah ekivalen rata-rata NPV per tahun yang terdiskonto
- Return to Labour: menunjukkan imbalan terhadap tenaga kerja yang diperoleh dari usaha tani atau tingkat upah
- Internal Rate of Return (IRR): tingkat efisiensi dari sebuah investasi dan menjadi alat ukur kemampuan usaha tani dalam mengembalikan bunga pinjaman
- Benefit Cost Ratio: Efisiensi dari usaha yang dilakukan. Membandingkan manfaat atau pendapatan kotor yang dengan biaya total (telah terdiskonto).

Profitabilitas Sistem Usaha Tani

Indikator Ekonomi	HHBK madu hutan
<i>Net Present Value (Rp/Ha)</i>	80,145,936
<i>Equivalent Annual Earnings (Rp/Ha/Thn)</i>	6,523,674
<i>IRR</i>	14%
<i>Return to Labour (Rp/HOK)</i>	229,486.65
<i>Gross Benefit Cost Ratio</i>	2
<i>Biaya Investasi (Rp/Ha)</i>	34,195,000
<i>Total Kebutuhan Tenaga Kerja di Tahun 1 (Hari Orang Kerja)</i>	301
<i>Total Kebutuhan Tenaga Kerja (Hari Orang Kerja)</i>	2,763

Perubahan dari Kawasan konservasi non kemitraan menjadi Kawasan kemitraan untuk pemanfaatan HHBK madu hutan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, yang dapat dilihat dari nilai NPV, EAE IRR, dan BCR yang lebih tinggi. Asumsi makroekonomi yang digunakan 7.1% untuk discount rate dan upah buruh per HOK Rp100.000.

Kegiatan penanaman pohon bergetah untuk bahan makanan lebah hutan dapat meningkatkan produktivitas hasil madu hutan. Pada simulasi ini, madu hutan dapat di panen ketika tanaman pohon yang di tanam berusia 11 tahun dengan rata-rata produksi 250-300 L/tahun. Asumsi masyarakat melakukan pemanenan madu hutan dilakukan sekali setahun karena ada keterbatasan hak adat untuk mengambil sarang madu di pohon-pohon tertentu yang sudah di tetapkan sesuai suku-suku yang ada disana. Kegiatan pemanenan madu hutan dimulai dari pencarian sarang madu, eksplorasi sarang madu, pengasapan, pengangkutan, penyaringan dan pengemasan. Madu hutan dijual dalam bentuk botolan dengan harga jual 120.000/L.

Strategi 1-Penguatan Pengelolaan Kemitraan Konservasi

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
1.1	Terbentuknya Ijin Perhutanan Sosial:				
1.1.1	Ijin Kelola, SK KLHK, Kontrak Kerja PS;	Gapoktan PS di SL49;	Terkelolanya 40 Ha areal untuk peningkatan kualitas hutan dan ekosistem flora dan fauna;	UPT KPH, DLHK, KLHK	Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS, Dinas TPHP TTS, Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTS, Dinas PMD Kab. TTS, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perijinan) Kab. TTS, PDAM, BAPPEDA, Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, NGO, Akademisi, Swasta.
1.1.2	RKPS, RKT, RUPS;	Terkelolanya areal untuk peningkatan kualitas hutan dan ekosistem flora dan fauna.	Terkelolanya 40 Ha areal untuk peningkatan kualitas hutan dan ekosistem flora dan fauna.		
1.2	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan				
1.2.1	Pendampingan PS, Polisi Kehutanan	Gapoktan PS	Pendampingan terhadap 5 Gapoktan PSW	UPT KPH, Dinas TPHP	BAPPEDA, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Camat, Pemerintahan Desa, Bumdes, kelompok tani/ Gapoktan.
1.2.2	Pelatihan kelompok PS	Ada pelatihan	Pelatihan diberikan kepada anggota 5 Gapoktan PS		
1.2.3	Lokasi percontohan penghijauan	Ada Lokasi penanaman	Luas Lokasi 40 Ha.		

Strategi 2- Rehabilitasi Hutan Berbasis Agroforestri dan Kearifan Lokal Untuk Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
2.1	Pengembangan Agroforestri:				
2.1.1	Penyuluhan dan pelatihan Pertanian Cerdas Iklim	Ada kegiatan penyuluhan	Penyuluhan pada 50 kelompok tani	UPT KPH, Dinas TPHP, Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PMD, PDAM, Pemerintahan Desa
2.1.2	Ada perencanaan dan desain lahan	Rencana kerja dan desain lahan	Ada perencanaan dan desain kebun pada luas lahan 40 Ha.		
2.1.3	Penerapan Konservasi Tanah dan Air				
2.1.4	Pelatihan dan Penguatan Kapasitas				

Strategi 3 - Pengembangan Produk Komoditas Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pertanian

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
3.1	Akta Notaris dan Ijin Balai POM	Memiliki badan hukum dan AD/ART			
3.1.1	Penyuluhan dan pelatihan	Ada kegiatan penyuluhan	11 unit koperasi HHBK den pangan lokal;	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas PMD, Pemerintah Desa, Badan Pendapatan Daerah, BAPPEDA, BALITBANGDA, Perguruan Tinggi, Mediat
3.1.2	Akses modal/ biaya	Tersedia sarana/ prasarana	Penyuluhan pada 11 unit koperasi		
3.1.3	Sarana/ Prasarana		Tersedia sarana/ prasarana pada 11 unit koperasi.		
3.1.4	Pelatihan dan Penguatan Kapasitas				

Kesimpulan

- 1 Rencana pengelolaan lanskap Mutis merupakan suatu instrument untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijaksana. Rencana pengelolaan lanskap ini mengarahkan alokasi ruang di lanskap Mutis sesuai dengan visi bersama yang telah disepakati, yaitu mewujudkan bentang lahan Mutis yang Lestari dan berkeadilan menuju masyarakat yang sehat, Sejahtera dan berbudaya dengan menawarkan beragam pendekatan untuk meningkatkan ketahanan lanskap dengan solusi berbasis alam.
- 2 Penyusunan Rencana Pengelolaan Lanskap merupakan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan di lanskap Mutis. Rencana ini merupakan hasil dari proses diskusi yang dihadiri dan disepakati bersama oleh perwakilan dari Desa Nunbena dan Desa Taneotob, Kecamatan Nunbena, perwakilan PPL dari Kecamatan Nunbena, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan dari PERUMDA TTS dan KPH Timor Tengah Selatan.
- 3 Menuju pencapaian visi pengelolaan lanskap Mutis, proses kolaboratif penyusunan Rencana Pengelolaan Lanskap menghasilkan 3 strategi utama, yaitu: 1) Penguatan pengelolaan kemitraan konservasi; 2) Rehabilitasi hutan berbasis agroforestri dan kearifan lokal untuk perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya air; dan 3) Pengembangan produk unggulan HHBK dan pertanian.
- 4 Setiap strategi pengelolaan lanskap Mutis memiliki serangkaian indikator, target, dan pemangku kepentingan penanggungjawab sebagai wujud pemantauan dan evaluasi secara partisipatif. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2035 lanskap Mutis telah menerapkan skema perhutanan sosial seluas 40 hektare
- 5 Lanskap Mutis memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan. Rencana pengelolaan ini disertai dengan model bisnis yang mendukung, yakni model bisnis rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola agroforestry di areal perhutanan sosial.
- 6 Keberhasilan implementasi strategi-strategi pada Rencana Pengelolaan Lanskap Oekita sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta. Selain itu, upaya mengintegrasikan rencana ini ke dalam kebijakan pengelolaan yang lebih luas, seperti dokumen RPJMD dan rencana sektoral lainnya, menjadi langkah yang krusial. Terakhir, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan juga berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan alternatif, guna mewujudkan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.



In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

